

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PEMUKIMAN DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Yatasha Qurrata A'yuni
NPP. 32.0109

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: yatashaqurrata@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Mujahidin, S.Sos., M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The high population density and increasingly dense residential areas in Banda Aceh City increase the risk of rapid fire spread, making residential fires the most frequent disaster and have the potential to cause major losses, both material and non-material. Although some previous studies have addressed the effectiveness of firefighting services, they are generally still general and have not specifically highlighted fire management in densely populated residential areas with an organizational effectiveness theory approach. This gap shows the need for a more in-depth analysis of the effectiveness of residential fire disaster management using a comprehensive approach. **Purpose:** This study aims to analyze the effectiveness of residential fire disaster management in Banda Aceh City. **Method:** This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data is collected through observation, interviews, and documentation to support the validity of the data. The theory used in this study is the theory of effectiveness from Duncan (1973), which includes three main indicators, namely goal achievement, integration, and adaptation. **Result:** The results of the study show that every aspect of the effectiveness indicator according to Duncan is almost met. However, it still requires various improvements and optimizations in terms of achieving goals, integration, and adaptation. The DPKP of Banda Aceh City experienced limitations in terms of fleet, out of a total of 22 fleets, 16 fleets were in a slightly damaged condition and 1 fleet was severely damaged. In addition, only 16 firefighters have received the Fire Certificate I of the Ciracas Education and Training Center out of a total of 65 firefighters at the Banda Aceh City DPKP. The Banda Aceh City DPKP has met the SPM in terms of response time, which is 11 minutes, and in 2023 the Banda Aceh City DPKP will achieve the target target of 95.32%. **Conclusion:** Based on the results of observations, documentation, and interviews with informants, the effectiveness of residential fire disaster management in Banda Aceh City is quite effective, but obstacles are still found such as fleet limitations, lack of personnel and skills, and low public awareness in preventing and responding to fires. Efforts made include submitting a budget for the addition and rejuvenation of the fleet, training personnel and recruiting volunteers, as well as increasing socialization activities to the community.

Keywords: Effectiveness, Disaster Management, Residential Fires

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya kepadatan penduduk dan semakin padatnya kawasan permukiman di Kota Banda Aceh meningkatkan risiko penyebaran api secara cepat, menjadikan kebakaran permukiman sebagai bencana yang paling sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun non-materiil. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran, penelitian-penelitian

tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti penanggulangan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk dengan pendekatan teori efektivitas organisasi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terhadap efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman di Kota Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pendukung keabsahan data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas dari Duncan (1973), yang mencakup tiga indikator utama yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap aspek dari indikator efektivitas menurut Duncan hampir terpenuhi. Namun, masih memerlukan berbagai perbaikan dan optimalisasi dalam aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. DPKP Kota Banda Aceh mengalami keterbatasan dalam hal armada, dari total 22 armada, 16 armada dalam kondisi rusak ringan dan 1 armada rusak berat. Selain itu, hanya 16 orang petugas pemadam yang telah mendapatkan Sertifikat Pemadam I Pusdiklat Ciracas dari total 65 orang petugas pemadam yang ada di DPKP Kota Banda Aceh. DPKP Kota Banda Aceh telah memenuhi SPM dalam hal waktu tanggap yaitu 11 menit, serta pada tahun 2023 DPKP Kota Banda Aceh memperoleh persentase pencapaian target sasaran sebesar 95.32%. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan para informan maka efektivitas penanggulangan bencana kebakaran permukiman di Kota Banda Aceh cukup efektif, namun masih ditemukan kendala seperti keterbatasan armada, kurangnya jumlah dan keterampilan personil, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencegah dan merespons kebakaran. Upaya yang dilakukan antara lain pengajuan anggaran untuk penambahan dan peremajaan armada, pelatihan personil dan perekrutan relawan, serta peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanggulangan Bencana, Kebakaran Permukiman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disaster atau bencana dapat dipahami sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan (Mujahidin, 2022:23). Penanggulangan bencana merupakan bagian dari manajemen bencana, yaitu bagian dari ilmu terapan yang mempelajari cara mengelola dan menyelesaikan masalah kebencanaan melalui analisis dan Tindakan yang sistematis (Evianny & Sutiyo, 2023:73). Dalam hal ini, Murdhani dan Mujahidin (2023) menekankan bahwa penanggulangan bencana menjadi landasan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan respons bencana dirancang secara terpadu dan berkelanjutan. Kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang sangat berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak ditangani dengan serius dan mendapatkan perhatian melalui upaya mitigasi bencana (Asiri, 2020). Kebakaran di permukiman seringkali membawa berbagai dampak negatif, terutama karena banyaknya aktivitas masyarakat yang meningkatkan risiko terjadinya bencana tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, kebakaran dikategorikan sebagai bencana alam dan non-alam berdasarkan penyebabnya. Beberapa faktor alam yang dapat menyebabkan kebakaran di permukiman antara lain sambaran petir, kekeringan, dan peningkatan suhu. Di sisi lain, faktor non-alam yang sering menyebabkan kebakaran mencakup hubungan arus pendek, ledakan kompor gas, sistem kelistrikan yang tidak memadai, pembuangan puntung rokok sembarangan, tindakan sabotase, kurangnya sistem pengamanan

kebakaran di gedung, serta minimnya pengawasan terhadap bahan kimia yang mudah terbakar. Indonesia sebagai salah satu negara yang menghadapi risiko bencana kebakaran yang tinggi, mengalami peningkatan frekuensi kebakaran di kawasan pemukiman akibat pertumbuhan kawasan perkotaan yang semakin padat dan mobilitas penduduk yang meningkat. Hal ini mencakup kebakaran di rumah, gedung sekolah, kantor pemerintahan, serta kebakaran bangunan dan kebakaran harta benda.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebuah kota besar didefinisikan sebagai area dengan populasi 100.000 sampai 1 juta jiwa. Namun, tinggal di kota dapat meningkatkan risiko kebakaran. Perubahan demografis, seperti meningkatnya jumlah lansia, penyandang disabilitas, imigran, dan orang yang hidup dalam kemiskinan, dapat memengaruhi keselamatan dalam menghadapi bencana kebakaran di perkotaan. Kota Banda Aceh berpenduduk 257.640 jiwa, kepadatan penduduk rata-rata mencapai 4.200 jiwa/km². Kenaikan kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang terfokus di kawasan perkotaan, yang tidak sejalan dengan perencanaan tata kota, serta terbatasnya lahan pemukiman, menjadikan Kota Banda Aceh sangat rentan terhadap bencana, terutama kebakaran di permukiman. Berdasarkan Statistik Daerah Kota Banda Aceh tahun 2023, Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 km²). Jenis penggunaan lahan terbesar digunakan untuk Ruang Terbuka dan Permukiman dengan luas masing-masing sebesar 3.095,08 Ha dan 1.181,28 Ha dari total luas 5.900,99 Ha. Studi internasional oleh Kuusaana dan Eledi (2015) yang dilakukan di Kota Wa, Ghana, menunjukkan bahwa pentingnya perencanaan tata ruang kota yang memperhitungkan risiko kebakaran sebagai bagian dari sistem mitigasi bencana di kawasan permukiman. Rahmah (2022) dalam studi internasionalnya menyebutkan bahwa: *'Forest fire controlling policy is essential to study because forest fire always occurs every year and has an impact on many things, including loss of benefits from forest potential, reduced forest area, unavailability of clean air, and loss of forest function. The occurrence of forest fires and the significant losses due to forest fires make the research of forest fires essential to make the relevant policy.'* Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan pengendalian kebakaran merupakan isu publik yang mendesak dan strategis, termasuk di kawasan permukiman padat seperti Kota Banda Aceh.

Di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, bangunan cenderung dibangun berdekatan. Hal ini mempercepat penyebaran api dari satu bangunan ke bangunan lainnya, sehingga meningkatkan potensi kerugian yang lebih besar saat kebakaran terjadi. Banyak permukiman padat penduduk menggunakan material bangunan yang mudah terbakar, seperti kayu atau bahan semi-permanen. Ketika kebakaran terjadi, material ini dapat memperburuk situasi dan mempercepat penyebaran api. Dalam permukiman padat, akses jalan sering kali sempit dan tidak memadai untuk kendaraan pemadam kebakaran, sehingga menghambat upaya penanganan kebakaran. *The effectiveness of fire disaster management depends on the comprehensive involvement of actors in all phases of disaster response, including pre-disaster, emergency, and post-disaster stages* (Rahmah et al. 2024). Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman tidak hanya dapat dipahami sebagai insiden teknis semata, tetapi juga sebagai hasil dari kegagalan sistem yang kompleks, sebagaimana dijelaskan dalam studi internasional oleh Akgün dan Er (2022), kedua studi tersebut menemukan bahwa kelalaian prosedur, kegagalan pengawasan, serta lemahnya komunikasi antarlembaga menjadi penyebab utama terjadinya bencana kebakaran. Pendekatan ini memperkuat pentingnya evaluasi sistemik dalam menilai efektivitas penanggulangan bencana, termasuk dalam konteks kebakaran permukiman di Indonesia yang melibatkan banyak aktor dan proses terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana, termasuk kebakaran, tidak hanya cukup dilakukan saat bencana berlangsung, tetapi perlu

dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh sejak tahap pencegahan hingga tahap rehabilitasi. Keterlibatan aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, menjadi faktor penting dalam memastikan koordinasi dan efektivitas tindakan di setiap fase penanggulangan bencana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanggulangan kebakaran di kawasan pemukiman tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tahun 2023 Aceh Dilanda 418 Bencana dengan kerugian 430 miliar rupiah. Kecenderungan bencana di Provinsi Aceh didominasi oleh bencana non alam yaitu kebakaran pemukiman. Kebakaran pemukiman merupakan bencana paling sering terjadi yakni sebanyak 149 kejadian. Jumlah kerugian yang diakibatkan oleh bencana ini sebanyak 87 miliar rupiah. Kerugian tersebut dihitung dari kerusakan infrastruktur, harta benda warga, dan lahan pertanian. Berdasarkan hasil analisis *trend* bencana, bencana kebakaran pemukiman dianggap menonjol serta kejadiannya terus terjadi di lapangan. Kebakaran pemukiman yang mencapai 149 kejadian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masalah ini sangat mendesak dan memerlukan perhatian serius.

Berdasarkan jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2019 ke 2021, terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah kasus kebakaran. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 87 kasus, yang menurun menjadi 56 kasus pada tahun 2021. Setelah mencapai titik terendah pada tahun 2021, angka kebakaran mulai meningkat lagi. Pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 63, dan kembali naik menjadi 67 kasus pada tahun 2023. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah kasus kebakaran dari tahun 2019 hingga 2021, terdapat tren peningkatan kembali dalam dua tahun terakhir. Hal ini menandakan perlunya perhatian lebih lanjut terhadap efektivitas penanggulangan bencana kebakaran pemukiman di Kota Banda Aceh untuk mengurangi jumlah kejadian kebakaran di masa depan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanggulangan bencana kebakaran maupun konteks efektivitas organisasi. Penelitian Suci Rahmadhani, Zikri Alhadi (2021) yang berjudul Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran menemukan bahwa Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang belum optimal, karena masih terdapat kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, dana serta SDM dalam penanggulangan kebakaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang belum maksimal dalam mencegah bahaya kebakaran. Penelitian Rizky Pratama Niluh Kusumawardani (2024) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan *Response Time* 7 Menit Layanan Pemadaman Kebakaran Gratis (Roti 7 Lapis) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya menemukan bahwa layanan Roti 7 Lapis memiliki efektivitas yang cukup baik. Indikator pencapaian tujuan telah menunjukkan hasil yang positif, dengan target waktu respons 7 menit yang berhasil dicapai dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Dalam hal integrasi, keterlibatan pemangku kepentingan sudah optimal. Untuk adaptasi, kemampuan personel pemadam kebakaran sudah optimal, tetapi jumlah pos pemadam kebakaran perlu ditingkatkan untuk memperbaiki ketersediaan sarana prasarana. Penelitian Devi Damayanti, Neti Sunarti, Otong Husni Taufiq (2021) yang berjudul Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis menemukan bahwa efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Ciamis umumnya berjalan dengan baik, meskipun pelayanan dapat dikatakan efektif, masih ada aspek-aspek penting yang perlu diperbaiki untuk

meningkatkan kualitas dan responsivitas dalam penanganan kebakaran. Penelitian Endri Fiondra, Erry Gusman & Edi Haskar (2023) yang berjudul Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam menemukan bahwa Efektivitas kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam sudah berjalan tapi belum optimal. Adapun Kendala dari efektivitas kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam adalah kecepatan dan ketepatan informasi kebakaran, luas daerah Kabupaten Agam yang begitu besar, keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan jumlah personil dan keterampilan personil, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar pada saat terjadi kebakaran. Selanjutnya penelitian Atika Resti Yulizar, Lince Magriasti (2023) yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menemukan bahwa Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih belum optimal, karena beberapa indikator efektivitasnya masih jauh dari standar yang diharapkan. Oleh karena itu, pihak pemadam kebakaran seharusnya lebih memperhatikan aspek tujuan yang ingin dicapai. Mereka tidak hanya perlu fokus pada pengurangan kasus kebakaran, tetapi juga harus mempertimbangkan ketepatan sasaran dan tujuan yang ingin diraih.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut membahas tentang efektivitas kinerja, pelayanan, dan pemberdayaan. Penelitian terdahulu tersebut juga membahas kebakaran secara umum. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menggunakan teori efektivitas untuk menganalisis atau membahas penanggulangan bencana kebakaran, khususnya kebakaran pemukiman. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tiga aspek utama untuk mengukur efektivitas menurut Teori Duncan (1973) yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Kelebihan dalam penelitian Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yaitu dokumen yang diambil merupakan dokumen terbaru, sehingga pada penelitian ini merupakan pembaruan dari penelitian sebelumnya dan menghasilkan penelitian yang termutakhir dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanggulangan bencana kebakaran pemukiman di Kota Banda Aceh

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2014:43), tujuan penelitian dengan metode deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai peristiwa-peristiwa, serta sifat hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti, serta kesimpulan yang diambil dari data yang dikumpulkan dan solusi dari masalah melalui analisis keadaan sebenarnya yang terjadi pada penanggulangan bencana kebakaran pemukiman di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap sebelas orang informan yang terdiri dari Kepala DPKP Kota Banda Aceh, Sekretaris DPKP Kota Banda Aceh, Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, Kepala Seksi Investigasi dan Pendataan, Petugas

Pemadam Kebakaran, dan dua orang masyarakat. Sebanyak sebelas orang informan dipilih secara *purposive* karena mereka merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penanggulangan bencana kebakaran di Kota Banda Aceh, baik dari aspek perencanaan, operasional, hingga evaluasi. Informan terdiri dari pejabat struktural, petugas lapangan, dan masyarakat yang memiliki pengalaman langsung, sehingga diharapkan mampu memberikan data yang mendalam, beragam perspektif, serta informasi yang relevan dan valid terhadap tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Pemukiman di Kota Banda Aceh

1. Pencapaian Tujuan

a) Ketepatan Waktu

jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2024 di Kota Banda Aceh adalah sebanyak 81 kejadian dengan total waktu respon 879 menit. Total *response time* yang dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh pada tahun 2024 adalah 11 menit yang diperoleh dengan membagi total waktu respon dengan jumlah kejadian kebakaran. Dalam hal ketepatan waktu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

b) Pencapaian Sasaran atau Target Konkret

Tabel 1. Tingkat Capaian Sasaran DPKP Kota Banda Aceh Tahun 2023

No.	Uraian Indikator Sasaran	Tingkat Capaian (%)
SANGAT BAIK		
1.	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	95.32
Tingkat Capaian Sasaran		95.32

Sumber: LKJIP DPKP Kota Banda Aceh, 2023

Dari rincian evaluasi kinerja kegiatan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja DPKP Kota Banda Aceh tahun anggaran 2023 telah tercapai.

c) Evaluasi Program Kerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan evaluasi secara berkelanjutan. Setiap bulan dijalankan evaluasi baik itu dari prasarana atau dari kejadian di lapangan saat menangani kebakaran. Serta setiap satu minggu sekali pada Hari Senin ketika apel pagi juga membahas terkait problematika yang dialami dalam penanggulangan kebakaran, yang dihadiri oleh seluruh pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.

2. Integrasi

a) Keterlibatan Stakeholder

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti; BPBA, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa). Kerja sama antar *stakeholder* sudah berjalan dengan optimal, setiap *stakeholder* yang terlibat berkontribusi sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.

b) Sosialisasi

Dalam hal sosialisasi, DPKP Kota Banda Aceh mempunyai kegiatan rutin yaitu Kunjungan Edukasi. Kegiatan ini menunjukkan salah satu upaya yang dilakukan oleh DPKP Kota Banda Aceh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada anak TK yang dihadiri juga oleh para guru dan wali murid. DPKP Kota Banda Aceh juga melakukan sosialisasi di sekolah, perbankan, rumah sakit, maupun instansi lainnya.

c) Prosedur

Dalam rangka pencapaian mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai pedoman tata kerja dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat. sejauh ini, DPKP Kota Banda Aceh telah mempunyai SOP yang lengkap mulai dari SOP Pembinaan, Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan. DPKP juga telah berupaya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Hanya saja, DPKP perlu untuk menyebarkan prosedur khusus layanan pelaporan kebakaran secara berkala agar dapat diketahui dan dipahami lebih banyak oleh masyarakat.

3. Adaptasi

a) Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Tabel 2. Rekapitulasi Perlengkapan DPKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	6 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	27 unit
3.	Mobil Operasional	19 unit
4.	Kendaraan Roda Dua	3 unit
5.	Peralatan dan Mesin	1.235 unit
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	726 unit
7.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	200 unit

Sumber: DPKP Kota Banda Aceh, 2024

DPKP Kota Banda Aceh mempunyai 5 pos yaitu Pos Induk, Pos WMK Pango, Pos WMK Simpang Mesra, Pos WMK Pelangi dan Pos WMK Keudah yang masing-masing pos

tersebut di isi oleh tiga orang petugas pemadam dan mempunyai satu armada. Pos-pos ini mempunyai peranan yang sangat krusial dalam sistem penanggulangan bencana kebakaran di suatu wilayah, keberadaan pos-pos ini berfungsi sebagai titik awal respon terhadap insiden kebakaran.

b) Keterampilan Petugas

Zein dan Septiani (2022) menyatakan bahwa: "*With adequate competence, high professionalism, and quality public services, civil servants in the North Jakarta Fire and Rescue Service can provide optimal services to the community.*" Kutipan ini menegaskan pentingnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjamin pelayanan publik yang optimal. Dalam konteks penanggulangan kebakaran, petugas yang memiliki keahlian teknis, kepemimpinan yang baik, dan integritas tinggi akan mampu merespons lebih cepat, lebih tepat, serta memberikan rasa aman dan puas bagi masyarakat. DPKP Kota Banda Aceh didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian menurut tingkat pendidikan sebagai berikut: Tingkat pendidikan terbanyak terdapat pada pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 24 orang, Strata 1 sebanyak 14 orang. Bila dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan, DPKP Kota Banda Aceh sudah memadai/menunjang sebagai institusi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

c) Ketersediaan Sumber Dana

Ketersediaan dana DPKP Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 7.683.427.524. Setiap tahunnya, DPKP mengajukan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai keperluan, mulai dari biaya operasional harian, pemeliharaan kendaraan dan peralatan pemadam, hingga pelatihan personel. Namun, karena anggaran daerah memiliki keterbatasan, DPKP harus melakukan skala prioritas agar dana yang tersedia dapat digunakan seefisien mungkin untuk kebutuhan yang paling mendesak. Selain APBD, Dana Otsus juga menjadi salah satu sumber dana operasional DPKP Kota Banda Aceh.

3.2. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Pemukiman di Kota Banda Aceh

1. Kekurangan Armada Pemadam Kebakaran

Tabel 3. Daftar Rincian Kendaraan Operasional DPKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan Operasional	Kondisi			Total
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Bermotor Khusus Pemadaman	2	10	1	13 Unit
2	Mini Bus / Pick Up Double Cabin	3	3	0	6 Unit
3	Sepeda Motor	0	3	0	3 Unit
Jumlah		5	16	1	22 Unit

Sumber: DPKP Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa kendaraan operasional DPKP Kota Banda Aceh sebagian besar dalam kondisi rusak ringan yaitu sebanyak 16 unit dari total 22 unit kendaraan operasional di

DPKP Kota Banda Aceh. Sedangkan kendaraan operasional dengan kondisi baik hanya berjumlah 5 unit dan 1 unit dengan kondisi rusak berat.

2. Kekurangan Jumlah dan Keterampilan Personil

Tabel 4. Data Kapasitas Sumber Daya Pemadam DPKP Kota Banda Aceh Tahun 2024

Aparatur Sipil Negara			Sertifikat			
PNS	Non PNS	Jumlah	Kemendagri	Pusdiklat Daerah	Luar Negeri	Jumlah
42	41	83	16	4	12	32

Sumber: DPKP Kota Banda Aceh, 2024

Standar minimal pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa setiap petugas pemadam diwajibkan mempunyai Sertifikat Pemadam I, yang didapatkan dengan melaksanakan pelatihan selama 1 (satu) minggu atau 70 (tujuh puluh) jam di Jakarta Timur, Ciracas. Namun kenyataannya saat ini di DPKP Kota Banda Aceh hanya 16 orang dari 65 personil lapangan yang sudah mengikuti Diklat Pemadam I dan mendapatkan sertifikat dan 1 (satu) orang inspektur. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari daerah yang menghalangi untuk memberangkatkan pemadam untuk melaksanakan diklat di Jakarta.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Saat Terjadinya Kebakaran

Tabel 5. Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2022-2024 di Kota Banda Aceh

No.	Kebakaran	Tahun Kejadian		
		2022	2023	2024
1.	Rumah	27	20	28
2.	Sekolah	2	1	0
3.	Mesjid	0	0	0
4.	Perkantoran	4	1	0
5.	Toko/Ruko	6	10	11
6.	Mobil/Sepeda Motor	4	7	5
7.	Ilalang	15	25	27
8.	Infrastruktur	6	3	11
Total Kejadian		64	67	81

Dari tabel 5, dapat dilihat bahwa kebakaran yang terjadi di rumah menjadi kebakaran yang paling sering terjadi di Kota Banda Aceh dalam tiga tahun terakhir. Dalam 3 tiga tahun terakhir, sudah ada 162 kejadian kebakaran yang terjadi di rumah. Kebakaran di rumah dapat disebabkan oleh korsleting listrik, penambahan ampere yang tidak sesuai prosedur, ledakan kompor atau tabung gas, dan lain sebagainya. Ketika kebakaran terjadi, masyarakat banyak yang belum mengetahui nomor pemadam kebakaran, sering pula ditemukan masyarakat yang tidak memberikan jalan kepada petugas pemadam kebakaran ketika sedang bertugas.

3.3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Pemukiman di Kota Banda Aceh

1. Pengajuan Anggaran untuk Penambahan Armada dan Rekondisi Armada Lama

DPKP Kota Banda Aceh saat ini tengah melakukan upaya serius untuk melakukan peremajaan armada pemadam yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun. Dengan mengganti armada yang sudah usang dengan kendaraan baru yang lebih modern dan efisien, DPKP Kota Banda Aceh dapat meningkatkan responsivitas dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan yang tidak perlu.

2. Perekrutan Relawan dan Pengajuan Anggaran untuk Pelatihan Personil

Keterlibatan relawan yang terlatih dan terorganisir dengan baik akan meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pelayanan, sehingga pada akhirnya dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa dan melindungi aset berharga di masyarakat. DPKP Kota Banda Aceh berupaya memanfaatkan dana otonomi khusus (otsus) untuk membiayai pelatihan petugas pemadam kebakaran. Pemanfaatan dana otsus ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selaras dengan tujuan penggunaannya.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait

DPKP Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya sosialisasi seperti mengadakan pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat. Kedua kegiatan ini telah mencapai target tahunan 100% pada tahun 2023.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penanggulangan bencana kebakaran pemukiman oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh berada dalam kategori cukup efektif jika dilihat dari tiga indikator teori Duncan (1973), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. DPKP Kota Banda Aceh mengalami keterbatasan dalam hal armada, dari total 22 armada, 16 armada dalam kondisi rusak ringan dan 1 armada rusak berat. Selain itu, hanya 16 orang petugas pemadam yang telah mendapatkan Sertifikat Pemadam I Pusdiklat Ciracas dari total 65 orang petugas pemadam yang ada di DPKP Kota Banda Aceh. DPKP Kota Banda Aceh telah memenuhi SPM dalam hal waktu tanggap yaitu 11 menit, tahun 2023 DPKP Kota Banda Aceh memperoleh persentase pencapaian target sasaran sebesar 95.32%. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Suci Rahmadhani (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemadaman kebakaran sangat ditentukan oleh kecepatan respons dan kesiapan petugas, penelitian ini juga menunjukkan bahwa DPKP Kota Banda Aceh memiliki waktu tanggap yang sesuai standar dan berupaya melaksanakan tugas pemadaman secara cepat dan terkoordinasi. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut, dalam konteks DPKP Banda Aceh belum terlihat sistem evaluasi kinerja yang terdokumentasi secara berkelanjutan serta belum adanya tindak lanjut yang tegas terhadap hasil evaluasi internal. Temuan ini juga memperkuat penelitian Rizky Pratama (2024) yang menjelaskan bahwa efektivitas penanganan kebakaran sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat. Hal serupa ditemukan dalam penelitian ini, di mana DPKP Banda Aceh menunjukkan koordinasi yang cukup baik dengan TNI, POLRI, PLN, dan masyarakat dalam proses penanggulangan. Meskipun demikian, sosialisasi pencegahan kebakaran masih belum merata dan belum menjadi kegiatan rutin, sehingga belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran pemukiman di Kota Banda Aceh pada DPKP Kota Banda Aceh, penanggulangan bencana kebakaran pemukiman cukup efektif sesuai dengan aspek pada teori Duncan (1973) dalam Steers. Hal itu dibuktikan dengan hampir terpenuhinya setiap aspek dari indikator efektivitas menurut Duncan. Namun, masih memerlukan berbagai perbaikan dan optimalisasi dalam aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam aspek integrasi, koordinasi antara DPKP dan berbagai instansi terkait telah berjalan cukup baik, khususnya dalam proses pemadaman kebakaran yang melibatkan kerja sama

dengan berbagai *stakeholder*. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebakaran sudah mulai meningkat, meskipun cakupannya masih terbatas dan perlu diperluas ke daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran. Dari segi prosedur, penelitian ini menemukan bahwa SOP (*Standard Operating Procedure*) penanggulangan kebakaran sudah diterapkan, tetapi masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah aksesibilitas lokasi kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk yang memiliki jalan sempit dan sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam. Dalam dimensi pencapaian tujuan, penelitian ini menunjukkan bahwa DPKP Kota Banda Aceh telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dalam menangani kebakaran, terutama dalam aspek respons darurat dan pemadaman api. Tingkat *response time* sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika dilihat dari capaian sasaran atau target konkret, DPKP telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama, seperti target waktu tanggap darurat dan jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani. Dari segi evaluasi program kerja, DPKP Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai kegiatan evaluasi, baik secara internal maupun melalui koordinasi dengan instansi terkait. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi yang berkelanjutan, terutama dalam aspek pendokumentasian hasil evaluasi dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dirumuskan. Dalam dimensi adaptasi, penelitian ini menunjukkan bahwa DPKP masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jumlah armada pemadam yang belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan, mengingat masih banyak petugas yang belum memiliki sertifikasi resmi dari Pusdiklatkar Ciracas. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan adaptasi DPKP adalah terbatasnya anggaran yang tersedia. Pendanaan untuk operasional dan peningkatan kapasitas DPKP saat ini masih terbatas dalam mencakup seluruh kebutuhan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu. Di mana waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas mengakibatkan peneliti sulit mendapatkan waktu yang lebih lama observasi lapangan yang seharusnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas penanggulangan bencana kebakaran pemukiman Kota Banda Aceh dalam menanggulangi bencana kebakaran untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Akgün, I., & Er, M. (2022). Investigating the Aracoma Alma Mine fire and SOMA Mine Disaster with the causal analysis based on systems theory: A comparative study. *Safety Science*, 149, 105663. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105663>

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Asiri, L. (2020). Pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2).
- Damayanti, D., Sunarti, N., & Taufiq, O. H. (n.d.). Efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran oleh unit pelaksana teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 7(1). <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Fiondra, E., Gusman, E., & Haskar, E. (2023). Efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam, 1(1).
- Kuusaana, E. D., & Eledi, J. A. (2015). Siting of fuel stations within residential areas in Ghanaian cities: Perceptions of residents in Wa on fire disaster risks. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 13, 477–486. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2015.08.003>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin. (2022). *Manajemen risiko bencana* (Sarkawi, Ed.). Mataram: Pustaka Bangsa.
- Murdhani, H. L. A., & Mujahidin. (2023). *Pengantar penanggulangan bencana* (A. Rahman, Ed.). Banyumas: Amerta Media.
- Muthmainnah, S. (2022). *Efektivitas penanggulangan bencana kebakaran pemukiman di Kota Langsa Provinsi Aceh*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pratama Niluh Kusumawardani, R., & Aktiva Oktarianda, T. (2024). Efektivitas pelaksanaan pelayanan response time 7 menit layanan pemadaman kebakaran gratis (Roti 7 Lapis) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 222–236.
- Rahmah, M. (2022). Bibliometric analysis: Forest fire controlling policy in Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 3(2), 60–74. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.14353>
- Rahmah, M., Khairi, H., Anggraini, W., Saribulan, N., & Hamdi, M. (2024). Weaving the nodes: Actor relations in forest fire handling. *IAPA 2023 Annual International Conference, KnE Social Sciences*, 9(7), 491–510. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15525>
- Rahmadhani, S., & Alhadi, Z. (2021). Efektivitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam pencegahan bahaya kebakaran. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 261–268. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.277>
- Resti Yulizar, A., & Magriasti, L. (2023). Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. *Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Publik*, 7.
- Steers, R. M. (2020). *Efektivitas organisasi* (M. Jamin, Penerj.; Edisi Kedua). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, D. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2022). Analysis of the competence and professionalism of the State Civil Apparatus (ASN) in improving public services in the fire and rescue service. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains (JASS)*, 3(1), 123–130.

